



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

2024

RENCANA KERJA PERUBAHAN



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

Jl. Pattimura No. 36A Telp./ Fax (0353) 885219 – Bojonegoro

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1

DAFTAR TABEL 2

BAB I PENDAHULUAN 3

 1.1. Latar Belakang 3

 1.2. Landasan Hukum 4

 1.3. Maksud dan Tujuan 5

 1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

 s.d SEMESTER I TAHUN 2024 7

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai
 dengan Semester I tahun 2024 dan Capaian Renstra
 Perangkat Daerah 7

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD..... 15

 3.1. Tujuan 15

 3.2. Sasaran 15

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN 18

 4.1. Program dan Kegiatan 18

BAB V PENUTUP 33

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro
s/d Semester I / Triwulan II Tahun 20249

Tabel 3.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro 17

Tabel 4.1. Rekapitulasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
P-APBD Tahun 2024 24

Tabel 4.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro 25

Tabel 4.3. Perubahan Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024..... 26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Perencanaan kegiatan pembangunan salah satunya disusun dalam Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 tahun. Setelah diadakan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 sampai triwulan ke II dengan memperhatikan pencapaian kinerja kegiatan pembangunan, kebutuhan, fenomena yang ada dan isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan rencana kerja serta masukan – masukan dari masyarakat serta instansi lain yang terkait dengan sektor perhubungan.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat Renja Perubahan Dishub adalah dokumen perencanaan Dinas Perhubungan untuk periode perubahan 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting pada Dinas Perhubungan, evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah sebelumnya, evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 sampai triwulan ke II dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perhubungan.

Renja Perubahan Dinas Perhubungan mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah. Dimana dalam penyusunannya harus sinkron dan berpedoman pada RKPD, Renstra PD, RPD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

1. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024;
- n. Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024;
- o. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan adalah:

1. Sebagai salah satu landasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro;
2. Menjabarkan rencana strategis kabupaten dalam rencana strategis Dinas Perhubungan jangka pendek (1 tahun).
3. Menyelaraskan rencana strategis kabupaten dengan pelayanan Dinas Perhubungan, usulan masyarakat, evaluasi kinerja tahun lalu dan Realisasi Rencana Kerja Dinas Perhubungan tahun 2024 sampai Triwulan ke II / Semetere I yang menjadi rencana strategis Dinas Perhubungan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan adalah:

1. Mewujudkan sinergi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Perhubungan dalam jangka 1 tahun.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Perhubungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Semester I Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan
- 3.2 Sasaran

BAB IV : PROGRAM DAN KEGIATAN

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Semester I Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Semester I Tahun 2024 Kabupaten Bojonegoro pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Kab. Bojonegoro Periode Pelaksanaan Triwulan 2 Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan Indikator	Target RENSTRA sampai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.d RENJA Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENSTRA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RENSTRA Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						7	8	9	10		11		12		13		14		15		16		17							
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
1	2	3			4	5			6	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	18		
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			DISHUB					
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																			DISHUB					
	Tujuan : Mewujudkan pelayanan prima dibidang perhubungan yang aman,nyaman dan berkeselamatan serta berkepastian hukum																													DISHUB
								Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Bidang Perhubungan	dari skala 1 s/d 4	3.126				3.0644																
								Wahana Tata Nugraha (WTN)		WTN				WTN																
								Menurunnya Angka Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas	Kejadian Kecelakaan	932				972		55		52				52		5.35 %		52		5.58 %		
	Sasaran : Meningkatnya Kepatuhan Berlalu lintas																												DISHUB	
								Persentase kendaraan yang lulus uji kir	%	99.6				99.5																
	Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Jalan																												DISHUB	
								Tingkat Pelayanan Jalan kabupaten																						
	Sasaran : Meningkatnya sarana prasarana Transportasi sesuai ketentuan yang berlaku																												DISHUB	
								Rasio standar fasilitas penyeberangan yang terpenuhi	%	81.2				81																
								Akreditasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor																						
								Persentase perlengkapan jalan yang terpasang	%	85.46				82.14																
1		2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					86,758,961,640			41,927,299,461		2,175,073,307		4,904,055,999				7,079,129,306		16.88 %		7,079,129,306		8.16 %	DISHUB
								Rasio tersedianya infrastruktur perhubungan yang sesuai standart	%	88.83				84.9																
		2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					67,137,600			22,382,200		507,200		633,000				1,140,200		5.09 %		1,140,200		1.70 %	DISHUB
								Jumlah penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen	3				1																
		2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					67,137,600			22,382,200		507,200		633,000				1,140,200		5.09 %		1,140,200		1.70 %	DISHUB
								Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	3				1																
		2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					2,454,292,800			3,330,779,405		14,491,000		187,900,786				202,391,786		6.08 %		202,391,786		8.25 %	DISHUB
								Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia	unit	912				301																
		2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					2,454,292,800			3,330,779,405		14,491,000		187,900,786				202,391,786		6.08 %		202,391,786		8.25 %	DISHUB
								Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	912				301																
		2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir					32,200,532,700			10,085,524,344		1,804,399,069		3,056,374,563				4,860,773,632		48.20 %		4,860,773,632		15.10 %	DISHUB
								Jumlah Dokumen penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Dokumen	36				12		3		3				6		50.00 %		6		16.67 %		

No	Tujuan / Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan Indikator	Target RENSTRA sampai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.d RENJA Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENSTRA Tahun2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi AnggaranRENSTRA Tahun2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						7	8	9		10		11		12			13		14		15			16		17						
1	2	3				4	5				6	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	18				
		2	15	02	2.04	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					32,200,532,700				10,085,524,344		1,804,399,069		3,056,374,563					4,860,773,632		48.20 %		4,860,773,632		15.10 %	DISHUB
								Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	36				12		3		3				6		50.00 %		6		16.67 %				
		2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					7,870,065,942				3,100,323,214		41,576,624		129,029,651					170,606,275		5.50 %		170,606,275		2.17 %	DISHUB
								Jumlah kendaraan bermotor yang melaksanakan uji kir	Kendaraan	32057				10579		2165		1994				4159		39.31 %		4159		12.97 %				
		2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					7,205,065,942				825,358,214		41,576,624		104,576,351					146,152,975		17.71 %		146,152,975		2.03 %	DISHUB
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	13				6																		
		2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					375,000,000				124,925,000															DISHUB	
								Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	15000				4750																		
		2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					290,000,000				2,150,040,000				24,453,300				24,453,300		1.14 %		24,453,300		8.43 %	DISHUB	
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	41				9				9			9		100 %		9		21.95 %					
		2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					42,388,392,048				24,055,366,448		286,022,166		1,351,552,651					1,637,574,817		6.81 %		1,637,574,817		3.86 %	DISHUB
								Jumlah dokumen kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	3				1																		
		2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota					2,244,724,848				869,966,848		33,762,166		230,726,119				264,488,285		30.40 %		264,488,285		11.78 %	DISHUB	
								Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	36				12		3		3				6		50.00 %		6		16.67 %				
		2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kab/Kota					134,123,500				44,687,500				9,420,000				9,420,000		21.08 %		9,420,000		7.02 %	DISHUB	
								Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	9				3		1					1		33.33 %		1		11.11 %					
		2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					39,793,862,900				22,525,031,300		252,260,000		1,110,835,732				1,363,095,732		6.05 %		1,363,095,732		3.43 %	DISHUB	
								Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Dokumen	1625				1220		280		46			326		26.72 %		326		20.06 %					
		2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					215,680,800				615,680,800				570,800				570,800		0.09 %		570,800		0.26 %	DISHUB	
								Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Laporan	3				1																		
		2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota					56,212,950				16,571,200		499,200		3,402,000				3,901,200		23.54 %		3,901,200		6.94 %	DISHUB	
								Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Dokumen	3				1																		
		2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin					29,309,400				7,559,200		499,200		1,740,000				2,239,200		29.62 %		2,239,200		7.64 %	DISHUB	

No	Tujuan / Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan Indikator	Target RENSTRA sampai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.d RENJA Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)	Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENSTRA Tahun2024	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi AnggaranRENSTRA Tahun2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						1	2	3				4	5	6	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	15				5		1		1					2		40.00 %		2		13.33 %		
		2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin			26,903,550				9,012,000				1,662,000					1,662,000		18.44 %		1,662,000		6.18 %	DISHUB
							Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Laporan	15				5		1		1					2		40.00 %		2		13.33 %		
		2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1,722,327,600				1,316,352,650		27,578,048		175,163,348					202,741,396		15.40 %		202,741,396		11.77 %	DISHUB
							Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai kebutuhan	Angkutan Umum	3				1																	
		2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			1,315,295,100				399,737,316		18,617,648		168,806,348					187,423,996		46.89 %		187,423,996		14.25 %	DISHUB
							Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	36				12		3		3					6		50.00 %		6		16.67 %		
		2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			407,032,500				916,615,334		8,960,400		6,357,000					15,317,400		1.67 %		15,317,400		3.76 %	DISHUB
							Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	3				1				1					1		100 %		1		33.33 %		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																							27.59 %	16.88 %			9.18 %	8.16 %	DISHUB	
PREDIKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																							Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	DISHUB	
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA PROGRAM								1. Adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang didukung dengan anggaran dan sarana prasarana yang memadai. 2. Terjadinya hubungan dan koordinasi yang baik di lingkup SKPD 3. Komitmen dan Integritas SDM																						
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM								1. Cuaca yang tidak menentu menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan																						
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA								1. Melaksanakan kegiatan sesuai renaksi kegiatan 2. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 3. Meningkatkan koordinasi dan meningkatkan sinergi agar target kegiatan dan anggaran tercapai																						
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPd PD TAHUN BERIKUTNYA																														
2		2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			90,151,700				159,395,900		6,043,900		4,000,000					10,043,900		6.30 %		10,043,900		11.14 %	DISHUB
							Persentase penyediaan dan pemeliharaan alat keselamatan pelayanan sesuai standart	%	74.42				67.5																	
		2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			90,151,700				159,395,900		6,043,900		4,000,000					10,043,900		6.30 %		10,043,900		11.14 %	DISHUB
							Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat keselamatan pelayaran sesuai standart	unit	3				1																	
		2	15	03	2.13	0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan			90,151,700				159,395,900		6,043,900		4,000,000					10,043,900		6.30 %		10,043,900		11.14 %	DISHUB
							Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Laporan	36				12		3		3					6		50.00 %		6		16.67 %		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																							25.00 %	6.30 %			8.34 %	11.14 %	DISHUB	
PREDIKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																							Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	DISHUB	
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA PROGRAM								1. Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran secara rutin 2. Komitmen dan Integritas SDM 3. Komunikasi dan koordinasi lintas program/lintas sektor yang intensif																						

No	Tujuan / Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan Indikator	Target RENSTRA sampai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.d RENJA Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENSTRA Tahun2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi AnggaranRENSTRA Tahun2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						7	8			9		10		11		12	13	14		15		16		17			
1	2	3	4	5	6	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	18	
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM						1. Cuaca yang tidak menentu menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan																					
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA						1. Melaksanakan kegiatan sesuai renaksi kegiatan 2. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 3. Meningkatkan koordinasi dan meningkatkan sinergi agar target kegiatan dan anggaran tercapai																					
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD PD TAHUN BERIKUTNYA																											
3		2 15 05		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			12,480,448,200				9,895,656,650		799,920,140		1,823,863,270					2,623,783,410		26.51 %		2,623,783,410		21.02 %	DISHUB
					Prosentase penyediaan dan Pengendalian infrastruktur di perlintasan sebidang yang sesuai standart	%	72.6			64.38																	
		2 15 05 2.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapiian			12,480,448,200			9,895,656,650		799,920,140		1,823,863,270						2,623,783,410		26.51 %		2,623,783,410		21.02 %	DISHUB
					Jumlah penetapan rencana induk Perkeretaapiian yang ditetapkan	Dokumen	3			1																	
		2 15 05 2.01 0003		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapiian			12,480,448,200			9,895,656,650		799,920,140		1,823,863,270						2,623,783,410		26.51 %		2,623,783,410		21.02 %	DISHUB
					Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapiian	Laporan	36			12		3		3				6		50.00 %		6		16.67 %			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																					25.00 %	26.51 %			8.34 %	21.02 %	DISHUB
PREDIKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	DISHUB
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA PROGRAM						1. Adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang didukung dengan anggaran dan sarana prasarana yang memadai. 2. Terjadinya hubungan dan koordinasi yang baik di lingkup SKPD 3. Melaksanakan kegiatan sesuai kegiatan sesuai time schedule																					
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM						1. Cuaca yang tidak menentu menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan																					
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA						1. Melaksanakan kegiatan sesuai renaksi kegiatan 2. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 3. Meningkatkan koordinasi dan meningkatkan sinergi agar target kegiatan dan anggaran tercapai																					
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD PD TAHUN BERIKUTNYA																											
					NON URUSAN																				DISHUB		
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																				DISHUB		
	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah																									DISHUB	
4		X XX 01		Predikat SAKIP Dinas Perhubungan		83			77																		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA		44,731,577,003			19,474,185,345		1,946,291,817		6,117,357,500					8,063,649,317		41.41 %		8,063,649,317		18.03 %	DISHUB	
					Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100			100		25		25				25		25.00 %		25		25.00 %			
		X XX 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			302,285,700			175,796,800		13,201,220		29,053,630					42,254,850		24.04 %		42,254,850		13.98 %	DISHUB	
					Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	36			12		3		3				6		50.00 %		6		16.67 %			
		X XX 01 2.01 0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			152,460,800			62,019,400		6,841,610		13,571,815					20,413,425		32.91 %		20,413,425		13.39 %	DISHUB	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	18			6		2		1				3		50.00 %		3		16.67 %			
		X XX 01 2.01 0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1,118,400			372,700				372,700					372,700		100 %		372,700		33.32 %	DISHUB	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3			1		1						1		100 %		1		33.33 %			
		X XX 01 2.01 0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1,251,600			417,100																DISHUB	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	3			1																	
		X XX 01 2.01 0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1,665,600			551,700				551,700					551,700		100 %		551,700		33.12 %	DISHUB	

No	Tujuan / Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan Indikator	Target RENSTRA sampai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENTRA s.d RENJA Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENTRA Tahun2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi AnggaranRENTRA Tahun2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										I		II		III		IV															
						1	2	3				4	5		6	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	3					1		1						1		100 %		1		33.33 %			
		X XX 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							969,600				318,200																DISHUB	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	3					1																	
		X XX 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							122,780,100				42,124,300		5,641,610		13,122,415				18,764,025		44.54 %		18,764,025		15.28 %	DISHUB		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	36					12		3		3				6		50.00 %		6		16.67 %			
		X XX 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							22,039,600				69,993,400		718,000		1,435,000				2,153,000		3.08 %		2,153,000		9.77 %	DISHUB		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3					1																	
		X XX 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							34,099,090,692				12,678,910,990		1,527,033,107		3,146,748,517				4,673,781,624		36.86 %		4,673,781,624		13.71 %	DISHUB		
							Jumlah laporan keuangan yang disusun	Laporan	36					12		3		3				6		50.00 %		6		16.67 %			
		X XX 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							32,515,370,952				11,550,291,731		1,445,770,107		3,014,052,779				4,459,822,886		38.61 %		4,459,822,886		13.72 %	DISHUB		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	2340					780		195		194				389		49.87 %		389		16.62 %			
		X XX 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							211,327,200				325,853,259		4,860,000		14,420,738				19,280,738		5.92 %		19,280,738		9.12 %	DISHUB		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	36					12		3		3				6		50.00 %		6		16.67 %			
		X XX 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							1,337,646,000				790,282,000		74,816,000		116,224,000				191,040,000		24.17 %		191,040,000		14.28 %	DISHUB		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	36					12		3		3				6		50.00 %		6		16.67 %			
		X XX 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							1,548,300				516,300																DISHUB	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3					1																	
		X XX 01 2.02 0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							5,776,800				1,525,300																	DISHUB
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	3					1																	
		X XX 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							25,873,140				9,927,400		1,587,000		2,051,000				3,638,000		36.65 %		3,638,000		14.06 %	DISHUB		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	54					18		4		5				9		50.00 %		9		16.67 %			
		X XX 01 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							1,548,300				515,000																	DISHUB
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	3					1																	
		X XX 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							3,189,600,000				1,156,365,300		43,950,000		825,451,250				869,401,250		75.18 %		869,401,250		27.26 %	DISHUB		
							Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun	laporan	3					1																	
		X XX 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							3,189,600,000				1,156,365,300		43,950,000		825,451,250				869,401,250		75.18 %		869,401,250		27.26 %	DISHUB		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1455					485																	
		X XX 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							787,885,298				551,700,299		56,995,028		61,052,417				118,047,445		21.40 %		118,047,445		14.98 %	DISHUB		

No	Tujuan / Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan Indikator	Target RENSTRA sampai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.d RENJA Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENSTRA Tahun2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi AnggaranRENSTRA Tahun2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
															I		II		III		IV											
										1	2	3					4	5		6	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K
								Jumlah laporan administrasi umum yang disusun	Laporan	24			8		2		2						4		50.00 %		4		16.67 %			
		X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			64,269,400				17,618,100				4,429,000					4,429,000		25.14 %		4,429,000		6.89 %	DISHUB		
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3			1																			
		X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			137,503,050				103,245,800				7,499,200					7,499,200		7.26 %		7,499,200		5.45 %	DISHUB		
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9			3			1						1		33.33 %		1		11.11 %				
		X	XX	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			38,557,500				22,359,200				7,657,300					7,657,300		34.25 %		7,657,300		19.86 %	DISHUB		
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6			2			1						1		50.00 %		1		16.67 %				
		X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			120,145,000				89,855,100		13,070,600							13,070,600		14.55 %		13,070,600		10.88 %	DISHUB		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	9			3		1								1		33.33 %		1		11.11 %			
		X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			73,530,000				24,511,100		3,000,000							3,000,000		12.24 %		3,000,000		4.08 %	DISHUB		
								Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6			2		1							1		50.00 %		1		16.67 %				
		X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			16,200,000				5,400,000				2,225,000					2,225,000		41.20 %		2,225,000		13.73 %	DISHUB		
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	36			12			6						6		50.00 %		6		16.67 %				
		X	XX	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			246,000,000				255,750,583		36,150,000		27,836,675					63,986,675		25.02 %		63,986,675		26.01 %	DISHUB		
								Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	36			12		3		3						6		50.00 %		6		16.67 %			
		X	XX	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			91,680,348				32,960,416		4,774,428		11,405,242					16,179,670		49.09 %		16,179,670		17.65 %	DISHUB		
								Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	36			12		3		3						6		50.00 %		6		16.67 %			
		X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2,120,394,620				2,382,470,800		114,400,000		1,701,663,220					1,816,063,220		76.23 %		1,816,063,220		85.65 %	DISHUB		
								Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Unit	533			466		11		252					263		56.44 %		263		49.34 %				
		X	XX	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel			227,645,200				264,464,600																	DISHUB	
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	179			163																			
		X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1,892,749,420				2,118,006,200		114,400,000		1,701,663,220					1,816,063,220		85.74 %		1,816,063,220		95.95 %	DISHUB		
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	354			303		11		252					263		86.80 %		263		74.29 %				
		X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,001,980,693				1,692,836,156		190,712,462		280,545,742					471,258,204		27.84 %		471,258,204		15.70 %	DISHUB		
								Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Jenis	9			3																			
		X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			9,509,400				3,168,900																	DISHUB	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3			1																			
		X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1,719,165,021				1,063,806,832		124,060,162		124,567,292					248,627,454		23.37 %		248,627,454		14.46 %	DISHUB		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	183			61		15		15					30		49.18 %		30		16.39 %				
		X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1,273,306,272				625,860,424		66,652,300		155,978,450					222,630,750		35.57 %		222,630,750		17.48 %	DISHUB		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36			12		3		3					6		50.00 %		6		16.67 %				

No	Tujuan / Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan Indikator	Target RENSTRA sampai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.d RENJA Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENSTRA Tahun2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi AnggaranRENSTRA Tahun2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										7		8				9		10		11		12											13		14		15	
										1	2	3					4	5					6	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,230,340,000					836,105,000									72,842,724					72,842,724		8.71 %		72,842,724		5.92 %	DISHUB	
								Jumlah Pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan	Unit	174				58		17			13							30			51.72 %		30			17.24 %				
		X	XX	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				161,150,000					76,750,000									13,988,773					13,988,773		18.23 %		13,988,773		8.68 %	DISHUB	
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	99				33		11			7							18			54.55 %		18			18.18 %				
		X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				485,160,000					527,225,000									52,025,151					52,025,151		9.87 %		52,025,151		10.72 %	DISHUB	
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	33				11		3			3							6			54.55 %		6			18.18 %				
		X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35,100,000					40,540,000										6,828,800					6,828,800		16.84 %		6,828,800		19.46 %	DISHUB
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	36				12		3			3							6			50.00 %		6			16.67 %				
		X	XX	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				548,930,000					191,590,000																				DISHUB		
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6				2																								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																										36.40 %		41.41 %				14.08 %		18.03 %	DISHUB			
PREDIKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																										Sangat Rendah		Sangat Rendah				Sangat Rendah		Sangat Rendah	DISHUB			
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA PROGRAM									1. Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran secara rutin 2. Terjadinya hubungan dan koordinasi yang baik di lingkup SKPD 3. Adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang didukung dengan anggaran dan sarana prasarana yang memadai.																													
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM									1. Cuaca yang tidak menentu menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan																													
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA									1. Melaksanakan kegiatan sesuai renaksi kegiatan 2. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 3. Meningkatkan koordinasi dan meningkatkan sinergi agar target kegiatan dan anggaran tercapai																													
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD PD TAHUN BERIKUTNYA																																						
JUMLAH TOTAL										144,061,138,543		0		71,456,537,356		4,927,329,164		12,849,276,769		0		0		17,776,605,933				17,776,605,933										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																										28.50 %		24.88 %				9.98 %		12.34 %				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																										Sangat Rendah		Sangat Rendah				Sangat Rendah		Sangat Rendah				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TUJUAN

Tujuan pembangunan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dan merupakan hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dan merupakan rumusan dari visi misi pembangunan kedalam bentuk yang lebih terarah. Tujuan pembangunan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang yang akan mengarahkan perumusan sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka merealisasi visi dan misi Kabupaten Bojonegoro.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro pada umumnya dan khususnya sektor Perhubungan mendukung Tujuan ke 5 RPD Kabupaten Bojonegoro yaitu “Meningkatkan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan ekonomi antar wilayah berbasis risiko dan pembangunan berkelanjutan”, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro mempunyai tujuan yang akan dicapai yaitu “Mewujudkan Pelayanan prima di bidang Perhubungan yang aman, nyaman dan berkeselamatan serta berkepastian hukum” dengan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Bidang Perhubungan, Wahana Tata Nugraha (WTN), dan Menurunnya Angka Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas.

3.2 SASARAN

Sasaran pembangunan merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perhubungan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan kuantitatif sehingga mudah diukur, Karena sasaran harus memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, rinci, dapat tercapai dan terukur.

Adapun sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro yang pertama adalah “Meningkatnya sarana prasarana Transportasi sesuai ketentuan yang berlaku”. Indikator Sasaran yang dimaksud mencakup beberapa hal yaitu :

1. Rasio standar fasilitas penyeberangan yang terpenuhi
2. Persentase perlengkapan jalan yang terpasang
3. Akreditasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

Sasaran yang kedua Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro adalah “Meningkatnya Kepatuhan Berlalu lintas “. Indikator Sasaran yang dimaksud mencakup hal yaitu :

1. Persentase kendaraan yang lulus uji kir

Sasaran yang ke tiga Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro adalah “Meningkatnya Pelayanan Jalan”. Indikator Sasaran yang dimaksud mencakup beberapa hal yaitu :

1. Tingkat Pelayanan Jalan kabupaten

Sasaran yang ke empat Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro adalah

“Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah”.

Indikator Sasaran yang dimaksud mencakup beberapa hal yaitu :

1. Predikat SAKIP Dinas Perhubungan

TABEL 3.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOJONEGORO

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Formulasi	Target 2024
1.	Tujuan RPD : Meningkatkan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan ekonomi antar wilayah berbasis risiko dan pembangunan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Terdapat 6 unsur utama untuk mengukur IKLI: (Ketersediaan Fisik (availability), Kualitas Fisik (quality), Kesesuaian (Appropriateness), Efektivitas Pemanfaatan (Utility), Penyerapan tenaga kerja (job creation), Kontribusi pada perekonomian	2,99
1.1	Sasaran RPD : Meningkatnya pemerataan dan keseimbangan infrastruktur antar wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Bidang Perhubungan	Nilai Komposit dari Aspek Layanan Infrastruktur Perhubungan	3,0644
1.	Tujuan PD : Mewujudkan pelayanan prima dibidang perhubungan yang aman,nyaman dan berkeselamatan serta berkepastian hukum	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Bidang Perhubungan	Nilai Komposit dari Aspek Layanan Infrastruktur Perhubungan	3,0644
		Wahana Tata Nugraha (WTN)	Hasil Keputusan Kementerian Perhubungan	WTN
		Menurunnya Angka Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas	Jumlah Angka Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas tahun n - tahun n-1	972
1.1	Sasaran : Meningkatnya sarana prasarana Transportasi sesuai ketentuan yang berlaku	Rasio standar fasilitas penyeberangan yang terpenuhi	Jumlah Tambangan standar / Jumlah Total Tambangan X 100%	81%
		Persentase perlengkapan jalan yang terpasang	Jumlah yang terpasang/ Jumlah Kebutuhan X 100%	82,14%
		Akreditasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Akumulasi dari Penilaian terhadap Standar pelayanan 30 % dan Standar teknis 70 % UPT - PKB	A
1.2	Sasaran : Meningkatnya Kepatuhan Berlalu lintas	Persentase kendaraan yang lulus uji kir	Jumlah kendaraan yang lulus uji/ Jumlah kendaraan yang melaksanakan uji X 100%	99,50%
1.3	Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Jalan	Tingkat Pelayanan Jalan Kabupaten	V/C Ratio	A

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2023 tentang APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024, pagu anggaran Dinas Perhubungan tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 71.456.537.356 yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 53.266.287.706 dan Belanja Modal sebesar Rp. 18.190.249.650 serta target PAD sebesar Rp. 20.161.040.705.

Pada Perubahan APBD 2024 yang semula pagu anggaran Dinas Perhubungan sebesar Rp. 71.456.537.356 menjadi sebesar Rp. 70.294.452.522 dengan rincian tambah/kurangnya sebagai berikut :

PAGU APBD 2024	:	Rp. 71.456.537.356
PAGU P-APBD 2024	:	Rp. 70.294.452.522
SELISIH	:	Rp. 1.162.084.834
RINCIAN		

NO	KETERANGAN	PAGU
1	Rincian Kegiatan Induk yang tidak dilaksanakan dan di geser ke Kegiatan Lain	Rp 3.171.231.152
2	Rincian Kegiatan yang di geser ke kegiatan lain	Rp 3.171.231.152
3	Penyesuaian Gaji dan TPP PNS Hasil Rekon dengan BPKAD	Rp 1.162.084.834
	SELISIH = (1-2-3)	Rp 1.162.084.834

KETERANGAN :

- 1 Rincian Kegiatan yang digeser ke kegiatan lain diperuntukan untuk :
- Indeks Kepuasan Layanan infrastruktur (IKLI)

Rp

50.000.000

- Belanja Sewa Peralatan Studio Audio

Rp

10.000.000

- Belanja Sewa Mebel (Kursi)

Rp

3.800.000

- Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Tenda)

Rp

13.200.000

- Belanja Lembur

Rp

16.584.000

- Honorarium Narasumber

Rp

83.600.000

- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan lainnya (korden)

Rp

5.990.400

- Mamin Rapat

Rp

16.880.000

- BBM

Rp

13.352.500

- Belanja Modal Mebel (Meja Rapat dan Kursi)

Rp

59.282.400

- Belanja Modal Generator Set

Rp

68.680.080

- Belanja Modal Video Conference System

Rp

62.516.643

- Belanja Modal Alat Pendingin (AC Standing)

Rp

109.656.800

- Belanja Modal Sound System	Rp	37.500.000
- Belanja Modal Lensa Tele	Rp	8.559.146
- Belanja Modal Hardisk Drive	Rp	42.347.885
- Belanja Modal NVR (Network Video Recorder)	Rp	64.313.164
- Belanja Tagihan Listrik & Tagihan Spektrum	Rp	10.007.634
- Belanja Pemeliharaan Personal Computer	Rp	4.380.000
- Belanja Cetak Karcis Parkir Harian	Rp	47.250.000
- Belanja Jasa Perencanaan (RPPJ)	Rp	21.000.000
- Belanja Jasa Pengawasan (RPPJ)	Rp	14.000.000
- Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar (RPPJ)	Rp	349.482.000
- Belanja Pemasangan & Pengadaan Jaringan Repeater	Rp	325.662.900
- Belanja Palang Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api	Rp	1.600.000.000
- Belanja Alat Komunikasi Lainnya (Power supply)	Rp	42.649.600
- Belanja Perjalanan Dinas	Rp	90.336.000
- Belanja Barang Pakai Habis	Rp	200.000
Jumlah Total		Rp 3.171.231.152

Pagu Anggaran P-APBD tahun 2024 sebesar Rp. 70.294.452.522 digunakan untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 52.838.145.654 dan untuk Belanja Modal sebesar Rp. 17.456.306.868 Sedangkan untuk target PAD pada P-APBD Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 15.954.142.400.

2.1.1 SEKRETARIAT

2.1.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten / kota

2.1.1.1.1 Perencanaan, Penganggaran Evaluasi kinerja Perangkat Daerah

No	Sub kegiatan	Evaluasi	Keterangan
1	2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terdapat Penambahan Belanja uang lembur, dan Pengurangan Belanja Perjadin	Dilakukan penyesuaian pagu dari 62.019.400 menjadi 61.527.400
2	2.15.1.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terdapat Penambahan Belanja uang lembur	Dilakukan penyesuaian pagu dari 42.124.300 menjadi 45.606.300
3	2.15.1.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terdapat Penambahan Anggaran untuk Indek Kepuasan Layanan Insfrastruktur (IKLI) Perhubungan dan Penambahan Belanja uang lembur, Honor Narsum, Sewa Kursi, Tenda dan Peralatan Studio Audio	Dilakukan penyesuaian pagu dari 69.933.400 menjadi 224.453.400

2.1.1.1.2Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	Sub kegiatan	Evaluasi	Keterangan
1	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terdapat Penyesuaian Belanja Gaji Tunjangan ASN dan Tambahan Penghasilan ASN	Dilakukan penyesuaian pagu dari 11.550.291.731 menjadi 10.388.206.897
2	2.15.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terdapat Pengurangan Belanja Perjalanan Dinas	Dilakukan penyesuaian pagu dari 325.853.259 menjadi 276.122.500
3	2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Terdapat Penyesuaian Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	Dilakukan penyesuaian pagu dari 790.282.000 menjadi 454.762.000
4	2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Terdapat Penambahan Belanja Lembur	Dilakukan penyesuaian pagu dari 9.927.400 menjadi 11.927.400

2.1.1.1.3Admistrasi Umum Perangkat Daerah

No	Sub kegiatan	Evaluasi	Keterangan
1	2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terdapat Penambahan Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan lainnya (korden)	Dilakukan penyesuaian pagu dari 103.245.800 menjadi 109.236.200
2	2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Adanya Penambahan Belanja mamin Rapat dan Belanja Perjadin Paket Meeting luar kota	Dilakukan penyesuaian pagu dari 89.855.100 menjadi 122.275.100
3	2.15.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan Material	Terdapat Penambahan Belanja BBM	Dilakukan penyesuaian pagu dari 255.750.583 menjadi 256.230.590

2.1.1.1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sub kegiatan	Evaluasi	Keterangan
1	2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Terdapat Penambahan Belanja Modal Kursi dan Meja Rapat	Dilakukan penyesuaian pagu dari 264.464.600 menjadi 299.663.000
2	2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terdapat Penambahan Belanja Modal yaitu Belanja Modal Generator set, Video Conference System, AC Standing, Sound System, Lensa Tele, Hardisk Drive, dan NVR (Network Video Recorder)	Dilakukan penyesuaian pagu dari 2.118.006.200 menjadi 2.454.584.218

2.1.1.1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sub kegiatan	Evaluasi	Keterangan
1	2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terdapat Penambahan Belanja Tagihan listrik dan Tagihan Biaya Hak spektrum frekuensi radio	Dilakukan penyesuaian pagu dari 1.063.806.832 menjadi 1.073.814.466
2	2.15.1.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terdapat Pengurangan Volume Belanja Pakaian Batik di sesuaikan dengan jumlah staf dan pejabat saat ini	Dilakukan penyesuaian pagu dari 625.860.424 menjadi 625.035.424

2.1.1.1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sub kegiatan	Evaluasi	Keterangan
1	2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terdapat Penambahan Belanja Pemeliharaan Personal Computer	Dilakukan penyesuaian pagu dari 40.540.000 menjadi 44.920.000

2.1.2 BIDANG LALU LINTAS

2.1.2.1 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

2.1.2.1.1 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

No	Sub kegiatan	Evaluasi	Keterangan
1	2.15.02.2.04.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Adanya Penambahan untuk Belanja Cetak Karcis Parkir Harian	Dilakukan penyesuaian pagu dari 10.085.524.344 menjadi 10.132.774.344

2.1.2.1.2Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

No	Sub kegiatan	Evaluasi	Keterangan
1	2.15.02.2.06.02016 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terdapat pergeseran Belanja Smart Traffic light yang di alihkan ke Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar (RPPJ), Belanja Perencanaan dan Pengawasan (RPPJ) untuk mendukung kegiatan Geopark di Bojonegoro	Dilakukan penyesuaian pagu dari 22.525.031.300 menjadi 22.659.513.300

2.1.3 BIDANG ANGKUTAN

2.1.3.1 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

2.1.3.1.1 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

No	Sub kegiatan	Evaluasi	Keterangan
1	2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Adanya Penambaan Belanja Belanja Perjalanan Dinas	Dilakukan penyesuaian pagu dari 22.382.200 menjadi 55.988.200

2.1.3.1.2Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

No	Sub kegiatan	Evaluasi	Keterangan
1	2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Adanya penambahan Belanja Honor Narasumber dan Perjadin	Dilakukan penyesuaian pagu dari 44.687.500 menjadi 74.897.500

2.1.3.1.3Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

No	Sub kegiatan	Evaluasi	Keterangan
1	2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Adanya Pengurangan Narasumber, Belanja lembur dan Belanja Perjalanan Dinas	Dilakukan penyesuaian pagu dari 399.737.316 menjadi 315.732.316
2	2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	Ada Penambahan Belanja BBM dan Perjalanan Dinas serta terdapat pengurangan Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan dan Belanja Barang Tak Habis Pakai	Dilakukan penyesuaian pagu dari 916.615.334 menjadi 926.024.334

2.1.3.2 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

2.1.3.2.1 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

No	Sub kegiatan	Evaluasi	Keterangan
1	2.15.03.2.13.0010 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Adanya Penambahan Belanja Perjalanan Dinas	Dilakukan penyesuaian pagu dari 159.395.900 menjadi 170.175.900

2.1.4 BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI

2.1.4.1 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAPIAN

2.1.4.1.1 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian

No	Sub kegiatan	Evaluasi	Keterangan
1	2.15.05.2.01.0003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Terdapat pengurangan Belanja Jasa Tenaga Perhubungan, Belanja Diklat dan Sertifikasi, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, serta ada penambahan untuk Pemasangan dan Pengadaan Jaringan Repeater , Power supply RIG PJL dan Belanja Perjalanan Dinas, serta perubahan spesifikasi Belanja Modal Palang Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api	Dilakukan penyesuaian pagu dari 9.895.656.650 menjadi 9.515.495.950

Tabel 4.1

REKAPITULASI URUSAN

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN

P-APBD TAHUN 2024

No	Urusan /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah	Lokasi	Pendanaan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			Rp 70.294.452.522
1.1	Jumlah Program	4	Kab. Bojonegoro	
1.2	Jumlah Kegiatan	16	Kab. Bojonegoro	
1.3	Jumlah Sub Kegiatan	48	Kab. Bojonegoro	
Total Anggaran				Rp 70.294.452.522

Tabel 4.2
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KAB. BOJONEGORO

NO	URAIAN	PAD APBD	PAD P-APBD
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Retribusi Parkir Berlangganan	Rp. 15.505.214.400	Rp. 15.505.214.400
2	Retribusi Parkir Harian	Rp. 2.450.619.600	Rp. 448.928.000
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp. 2.205.206.705	-
Jumlah		Rp. 20.161.040.705	Rp. 15.954.142.400

Berdasarkan Tabel diatas dapat di sampaikan bahwa Target Retribusi Parkir Berlangganan pada P-APBD Tahun 2024 tidak mengalami penurunan maupun kenaikan target PAD, dan untuk Retribusi Parkir Harian mengalami penurunan target PAD dari target 2.450.619.600 menjadi 448.928.000 di P-APBD Tahun 2024, Selanjutnya Berdasarkan Undang – Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Serta Peraturann Pemerintah Kabupaten Bojonegoro No. 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mulai per tanggal 01 Januari 2024 telah memberlakukan Uji Kir Gratis atau Bebas Biaya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Dengan Program ini diharapkan bisa mendongkrak cakupan kendaraan yang melakukan uji kelayakan sehingga mencapai syarat teknis dan laik jalan. Program ini sekaligus Langkah preventif untuk mencegah dan meminimalisir kecelakaan di jalan.

Dari Evaluasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro menghasilkan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan pada Rencana Kerja Perubahan perangkat daerah tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro dapat dijelaskan dalam tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bojonegoro 2024

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebe lum	Sesu dah	Sebe lum	Sesu dah	Sebe lum	Sesu dah	Sebelum	Sesudah						
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													71.456.537.356	70.294.452.522				41.221.069.915
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)													41.927.299.461	42.098.251.461				22.584.488.714
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota													22.382.200	55.988.200				22.382.200
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rasio tersedianya infrastruktur perhubungan yang sesuai standart	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tingkat pelayanan berlalu lintas	Kab. Bojonegoro	84.90%	84.90%	1 Dok	1 Dok	A	A	22.382.200	55.988.200	Retribusi Daerah - LRA Pendapatan Bagi Hasil		Rasio tersedianya infrastruktur perhubungan yang sesuai standart	86.59%	22.382.200	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota													3.330.779.405	3.330.779.405				970.566.600
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rasio tersedianya infrastruktur perhubungan yang sesuai standart	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang	Kab. Bojonegoro	84.90%	84.90%	301 unit	301 unit	82,14	82,14	3.330.779.405	3.330.779.405	Retribusi Daerah - LRA Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Rasio tersedianya infrastruktur perhubungan yang sesuai standart	86.59%	970.566.600	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir													10.085.524.344	10.132.774.344				10.794.713.300
2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rasio tersedianya infrastruktur perhubungan yang sesuai standart	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tingkat pelayanan berlalu lintas	Kab. Bojonegoro	84.90%	84.90%	12 Dok	12 Dok	A	A	10.085.524.344	10.132.774.344	Retribusi Daerah - LRA Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil		Rasio tersedianya infrastruktur perhubungan yang sesuai standart	86.59%	10.794.713.300	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													3.100.323.214	3.100.323.214				6.624.887.264
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rasio tersedianya infrastruktur perhubungan yang sesuai standart	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Akreditasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Kab. Bojonegoro	84.90%	84.90%	6 unit	6 unit	A	A	825.358.214	825.358.214	Retribusi Daerah - LRA Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil		Rasio tersedianya infrastruktur perhubungan yang sesuai standart	86.59%	6.401.887.264	

2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rasio tersedianya infrastruktur perhubungan yang sesuai standart	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan lulus uji kir	Kab. Bojonegoro	84.90%	84.90%	4750 Dok	4750 Dok	99,50%	99,50%	124.925.000	124.925.000	Retribusi Daerah - LRA		Rasio tersedianya infrastruktur perhubungan yang sesuai standart	86.59%	125.000.000
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rasio tersedianya infrastruktur perhubungan yang sesuai standart	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Akreditasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Kab. Bojonegoro	84.90%	84.90%	9 unit	9 unit	A	A	2.150.040.000	2.150.040.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil		Rasio tersedianya infrastruktur perhubungan yang sesuai standart	86.59%	98.000.000
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota											24.055.366.448	24.220.058.448					3.625.075.800
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rasio tersedianya infrastruktur perhubungan yang sesuai standart	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Tingkat pelayanan berlalu lintas	Kab. Bojonegoro	84.90%	84.90%	12 Lap	12 Lap	A	A	869.966.848	869.966.848	Retribusi Daerah - LRA Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil		Rasio tersedianya infrastruktur perhubungan yang sesuai standart	86.59%	753.662.000
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rasio tersedianya infrastruktur perhubungan yang sesuai standart	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Tingkat pelayanan berlalu lintas	Kab. Bojonegoro	84.90%	84.90%	3 Lap	3 Lap	A	A	44.687.500	74.897.500	Retribusi Daerah - LRA Pendapatan Bagi Hasil		Rasio tersedianya infrastruktur perhubungan yang sesuai standart	86.59%	45.025.500
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Rasio tersedianya infrastruktur perhubungan yang sesuai standart	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang	Kab. Bojonegoro	84.90%	84.90%	1220 unit	1220 unit	82,14	82,14	22.525.031.300	22.659.513.300	Retribusi Daerah - LRA Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil		Rasio tersedianya infrastruktur perhubungan yang sesuai standart	86.59%	2.826.388.300
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rasio tersedianya infrastruktur perhubungan yang sesuai standart	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/kota	Tingkat pelayanan berlalu lintas	Kab. Bojonegoro	84.90%	84.90%	1 Lap	1 Lap	A	A	615.680.800	615.680.800	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil		Rasio tersedianya infrastruktur perhubungan yang sesuai standart	86.59%	-
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota											16.571.200	16.571.200					18.791.650
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Rasio tersedianya infrastruktur perhubungan yang sesuai standart	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Tingkat pelayanan berlalu lintas	Kab. Bojonegoro	84.90%	84.90%	5 Lap	5 Lap	A	A	7.559.200	7.559.200	Pendapatan Bagi Hasil		Rasio tersedianya infrastruktur perhubungan yang sesuai standart	86.59%	9.771.800
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Rasio tersedianya infrastruktur perhubungan yang sesuai standart	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Tingkat pelayanan berlalu lintas	Kab. Bojonegoro	84.90%	84.90%	5 Lap	5 Lap	A	A	9.012.000	9.012.000	Pendapatan Bagi Hasil		Rasio tersedianya infrastruktur perhubungan yang sesuai standart	86.59%	9.019.850

2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota											1.316.352.650	1.241.756.650					528.071.900
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rasio tersedianya infrastruktur perhubungan yang sesuai standart	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Tingkat pelayanan berlalu lintas	Kab. Bojoneg oro	84.90%	84.90%	12 Lap	12 Lap	A	A	399.737.316	315.732.316	Pendapatan Bagi Hasil		Rasio tersedianya infrastruktur perhubungan yang sesuai standart	86.59%	412.429.400
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio tersedianya infrastruktur perhubungan yang sesuai standart	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Tingkat pelayanan berlalu lintas	Kab. Bojoneg oro	84.90%	84.90%	1 unit	1 unit	A	A	916.615.334	926.024.334	Retribusi Daerah - LRA Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil		Rasio tersedianya infrastruktur perhubungan yang sesuai standart	86.59%	115.642.500
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN											159.395.900	170.175.900					31.742.600
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau											159.395.900	170.175.900					31.742.600
2.15.03.2.13.0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Persentase penyediaan dan pemeliharaan alat keselamatan pelayanan sesuai standart	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Rasio standar fasilitas penyeberangan yang terpenuhi	Kab. Bojoneg oro	67.50%	67.50%	12 Lap	12 Lap	81	81	159.395.900	170.175.900	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil		Persentase penyediaan dan pemeliharaan alat keselamatan pelayanan sesuai standart	70.88%	31.742.600
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN											9.895.656.650	9.515.495.950					4.167.330.400
2.15.05.2.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian											9.895.656.650	9.515.495.950					4.167.330.400
2.15.05.2.01.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Prosentase penyediaan dan Pengendalian infrastruktur di perlintasan sebidang yang sesuai standart	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Tingkat pelayanan berlalu lintas	Kab. Bojoneg oro	64.38%	64.38%	12 Lap	12 Lap	A	A	9.895.656.650	9.515.495.950	Retribusi Daerah - LRA Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Prosentase penyediaan dan Pengendalian infrastruktur di perlintasan sebidang yang sesuai standart	68.49%	4.167.330.400
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											19.474.185.345	18.510.529.211					14.437.508.201
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											175.796.800	333.246.800					90.877.900
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Predikat Sakip	Kab. Bojoneg oro	100%	100%	6 Dok	6 Dok	77	77	62.019.400	61.527.400	Pendapatan Bagi Hasil		Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	46.539.600
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Predikat Sakip	Kab. Bojoneg oro	100%	100%	1 Dok	1 Dok	77	77	372.700	372.700	Pendapatan Bagi Hasil		Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	372.800

2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Predikat Sakip	Kab. Bojoneg oro	100%	100%	1 Dok	1 Dok	77	77	417.100	417.100	Pendapatan Bagi Hasil		Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	417.200
2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Predikat Sakip	Kab. Bojoneg oro	100%	100%	1 Dok	1 Dok	77	77	551.700	551.700	Pendapatan Bagi Hasil		Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	555.200
2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Predikat Sakip	Kab. Bojoneg oro	100%	100%	1 Dok	1 Dok	77	77	318.200	318.200	Pendapatan Bagi Hasil		Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	323.200
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Predikat Sakip	Kab. Bojoneg oro	100%	100%	12 Lap	12 Lap	77	77	42.124.300	45.606.300	Pendapatan Bagi Hasil		Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	41.646.700
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Sakip	Kab. Bojoneg oro	100%	100%	1 Lap	1 Lap	77	77	69.993.400	224.453.400	Retribusi Daerah -LRA Pendapatan Bagi Hasil		Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.023.200
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											12.678.910.990	11.133.575.397					11.272.287.524
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Predikat Sakip	Kab. Bojoneg oro	100%	100%	780 oran/ bulan	780 oran/ bulan	77	77	11.550.291.731	10.388.206.897	Retribusi Daerah -LRA Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	10.744.830.704
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Predikat Sakip	Kab. Bojoneg oro	100%	100%	12 Dok	12 Dok	77	77	325.853.259	276.122.500	Pendapatan Bagi Hasil		Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	70.442.400
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Predikat Sakip	Kab. Bojoneg oro	100%	100%	12 Dok	12 Dok	77	77	790.282.000	454.762.000	Pendapatan Bagi Hasil		Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	445.882.000

2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Predikat Sakip	Kab. Bojonegoro	100%	100%	1 Lap	1 Lap	77	77	516.300	516.300	Pendapatan Bagi Hasil		Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	516.100
2.15.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Predikat Sakip	Kab. Bojonegoro	100%	100%	1 Dok	1 Dok	77	77	1.525.300	1.525.300	Pendapatan Bagi Hasil		Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	2.127.600
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Predikat Sakip	Kab. Bojonegoro	100%	100%	18 Lap	18 Lap	77	77	9.927.400	11.927.400	Pendapatan Bagi Hasil		Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	7.972.620
2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Predikat Sakip	Kab. Bojonegoro	100%	100%	1 Dok	1 Dok	77	77	515.000	515.000	Pendapatan Bagi Hasil		Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	516.100
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											1.156.365.300	1.156.365.300					1.063.200.000
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Predikat Sakip	Kab. Bojonegoro	100%	100%	485 paket	485 paket	77	77	1.156.365.300	1.156.365.300	Pendapatan Bagi Hasil		Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.063.200.000
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											551.700.299	590.590.706					274.922.366
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Predikat Sakip	Kab. Bojonegoro	100%	100%	1 paket	1 paket	77	77	17.618.100	17.618.100	Pendapatan Bagi Hasil		Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	23.325.500
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Predikat Sakip	Kab. Bojonegoro	100%	100%	3 paket	3 paket	77	77	103.245.800	109.236.200	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil		Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	56.249.250
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Predikat Sakip	Kab. Bojonegoro	100%	100%	2 paket	2 paket	77	77	22.359.200	22.359.200	Pendapatan Bagi Hasil		Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	12.852.500

2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Predikat Sakip	Kab. Bojonegoro	100%	100%	3 paket	3 paket	77	77	89.855.100	122.275.100	Retribusi Daerah - LRA Pendapatan Bagi Hasil		Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	40.025.000
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Predikat Sakip	Kab. Bojonegoro	100%	100%	2 paket	2 paket	77	77	24.511.100	24.511.100	Pendapatan Bagi Hasil		Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	24.510.000
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Predikat Sakip	Kab. Bojonegoro	100%	100%	12 Dok	12 Dok	77	77	5.400.000	5.400.000	Pendapatan Bagi Hasil		Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	5.400.000
2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Predikat Sakip	Kab. Bojonegoro	100%	100%	12 paket	12 paket	77	77	255.750.583	256.230.590	Retribusi Daerah - LRA Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil		Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	82.000.000
2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Predikat Sakip	Kab. Bojonegoro	100%	100%	12 Dok	12 Dok	77	77	32.960.416	32.960.416	Pendapatan Bagi Hasil		Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	30.560.116
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											2.382.470.800	2.754.247.218					314.750.180
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Indeks kepuasan masyarakat	Kab. Bojonegoro	87.25%	87.25%	163 unit	163 unit	77	77	264.464.600	299.663.000	Retribusi Daerah - LRA Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil		Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	32.000.000
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Indeks kepuasan masyarakat	Kab. Bojonegoro	87.25%	87.25%	303 unit	303 unit	77	77	2.118.006.200	2.454.584.218	Retribusi Daerah - LRA Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil		Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	282.750.180
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1.692.836.156	1.702.018.790					1.000.660.231
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks kepuasan masyarakat	Kab. Bojonegoro	87.25%	87.25%	1 Lap	1 Lap	77	77	3.168.900	3.168.900	Pendapatan Bagi Hasil		Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	3.169.800

2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Indeks kepuasan masyarakat	Kab. Bojonegoro	87.25%	87.25%	61 Lap	61 Lap	77	77	1.063.806.832	1.073.814.466	Retribusi Daerah - LRA Pendapatan Bagi Hasil		Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	573.055.007
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Indeks kepuasan masyarakat	Kab. Bojonegoro	87.25%	87.25%	12 Lap	12 Lap	77	77	625.860.424	625.035.424	Pendapatan Bagi Hasil		Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	424.435.424
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											836.105.000	840.485.000					420.810.000
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Indeks kepuasan masyarakat	Kab. Bojonegoro	87.25%	87.25%	33	33	77	77	76.750.000	76.750.000	Retribusi Daerah - LRA Pendapatan Bagi Hasil		Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	53.800.000
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Indeks kepuasan masyarakat	Kab. Bojonegoro	87.25%	87.25%	11 unit	11 unit	77	77	527.225.000	527.225.000	Retribusi Daerah - LRA Pendapatan Bagi Hasil		Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	163.720.000
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Indeks kepuasan masyarakat	Kab. Bojonegoro	87.25%	87.25%	12 unit	12 unit	77	77	40.540.000	44.920.000	Retribusi Daerah - LRA Pendapatan Bagi Hasil		Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	11.700.000
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indeks kepuasan masyarakat	Kab. Bojonegoro	87.25%	87.25%	2 unit	2 unit	77	77	191.590.000	191.590.000	Pendapatan Bagi Hasil		Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	191.590.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 disusun sebagai pelaksanaan / penjabaran Renstra secara tahunan. Rencana Kerja Tahunan sangat penting karena keberhasilan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra sangat tergantung pada perencanaan tahunan yang disusun.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2024. Selain itu Rencana Kerja Tahun ini juga berfungsi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja selama Tahun 2024.

Kedepan diharapkan Rencana Kerja Tahunan ini dapat sebagai pertimbangan dalam penyusunan perencanaan kinerja tahun berikutnya guna meningkatkan dan memperbaiki keberhasilan kinerja yang belum tercapai.

Bojonegoro, 31 Juli 2024


KEPADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BOJONEGORO
ANDIK SUDJARWO, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770129 199612 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Patimura Nomor 36/A Telp. (0353) 885219

BOJONEGORO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : 188/ LD /KEP/412.212/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOJONEGORO

MENIMBANG : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro;

b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro;

MENGINGAT : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Parturan Perundang – undangan (Lembaga Negara Tahun 2011) Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembar Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 – Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuda yang kemudian aturan pelaksanaannya diuraikan dalam Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 – 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun Rancangan Awal Renja Tahun 2024;
- b. Menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 berdasar Surat Edaran Bupati Bojonegoro tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- c. Menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah;
- d. Menyusun Rancangan Renja Tahun 2024;
- e. Menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 untuk ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bojonegoro;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro.

- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk segala sesuatunya akan diubah seraf dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : 02 Januari 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BOJONEGORO**



ANDIK SUDJARWO, S.STP, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19770129 199612 1 001

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Bojonegoro
NOMOR : 188/ 10 /KEP/412.212/2023
TANGGAL : 02 Januari 2023

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024**

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Kedinasan
1	Pengarah	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro
2	Ketua	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro
3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Program dan Laporan
4	Anggota	a. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro b. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro c. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro d. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro e. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro f. Kepala Seksi Pengendalian dan Operasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro g. Kepala Seksi Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro h. Kepala Seksi Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro i. Kepala Seksi Keselamatan Transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro j. Kepala Seksi Angkutan Orang Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro k. Kepala Seksi Angkuta Barang Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro l. Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro m. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bojonegoro

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BOJONEGORO**



ANDIK SUDJARWO, S.STP, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770129 199612 1 001